

H A R I A N

LENTERAInspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI JUMAT / 20 November 2020

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
SurabayaSederhana saja jangan
lakukan terhadap orang lain,
apa yang tak ingin orang lain
melakukannya terhadapmu

Gus Mus, Penyair

**MIMPI RI JADI
'HIGH INCOME
COUNTRY'**

SCAN ME

Resesi di Indonesia masih belum berakhir akibat terus melonjaknya kasus Covid-19. Di kuartal IV diprediksi pertumbuhan ekonomi tetap minus dikisaran - 3 persen. Walau demikian optimisme terus dibangun. Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi RI bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (High Income Country), meskipun baru akan terealisasi di 2045 nanti. Dalam waktu dekat yaitu 2021, negeri ini akan cepat pulih dengan ramalan pertumbuhan 5 persen. Salah satu 'angin segarnya' adalah keputusan Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan November ke level 3,75 persen. Semoga bukan sekadar mimpi!

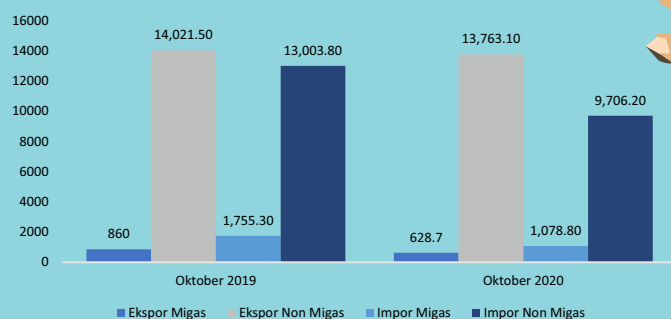
Baca Hal 11

**INDIKATOR MEMBAIKNYA
PEREKONOMIAN INDONESIA****Turunnya Berbagai Bunga
Sektor Perbankan
/November 2020**

- Turunnya tingkat suku bunga acuan menjadi 3,75%
- Turunnya tingkat suku bunga deposit facility menjadi 3%
- Turunnya tingkat suku bunga lending facility menjadi 4,5%

**Neraca Pembayaran
Indonesia (NPI) surplus**

- Capital inflow mencapai US\$3,68 miliar.
- Cadangan devisa mencapai US\$133,7 miliar
- Defisit Transaksi Berjalan di bawah 1,5% dari PDB di 2020

Ekspor-Impor Membaik**Inflasi Terjaga**

- Inflasi bulanan sebesar 0,07 persen
- Inflasi tahun berjalan 0,95 persen dan 1,44 persen secara tahunan tingkat suku bunga lending facility menjadi 4,5%



MENATA DUNIA YANG LEBIH BAIK UNTUK ANAK INDONESIA

Photo by Robert Collins on Unsplash

Tahukah Anda? Sejak tahun 1990, setiap 20 November selalu diperingati sebagai Hari Anak Sedunia. Dilansir dari situs resmi UNICEF, di tahun 2020 ini, perayaan Hari Anak Sedunia mengambil tema "Satu hari untuk menata dunia yang lebih baik untuk setiap anak" atau "A day to reimagine a better future for every child"

Namun, momen perayaan Hari Anak Sedunia tahun ini akan terasa berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti kita ketahui bersama, Pandemi Covid-19 menempatkan dunia dalam situasi krisis. Begitupula dengan anak-anak. Tahun ini, praktis anak-anak hanya bersekolah di 3 bulan awal di tahun 2020, dan sisanya belajar dari rumah.

Pertemuan siswa dan guru yang awalnya dilakukan dengan tatap muka di kelas, kini harus terpisahkan karena pola pembelajaran berubah menjadi daring. Ironisnya, kondisi pola pembelajaran ini tak mengenal jenjang sekolah, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Semua dilakukan secara daring.

Beberapa waktu lalu diberitakan, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim, dr. Endah Setyarini, S.Pa secara tegas mengatakan, meski di beberapa sekolah di

daerah mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, akan tetapi langkah uji coba itu sebaiknya jangan dilakukan. Karena belum ada rekomendasi dari organisasi kesehatan dunia World Health Organization (WHO) dan IDAI selama daerah itu masih rawan dengan Covid-19.

"Pembelajaran tatap muka belum direkomendasikan selama suatu daerah belum menjadi zona hijau, atau setidaknya zona kuning," tegas Endah saat diskusi online bertema Vaksin Covid-19 dan Kesiapan Anak Menjalani Pembelajaran Tatap Muka yang diselenggarakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung dan Jurnalis Sahabat Anak (JSA) didukung oleh Unicef Indonesia, Rabu (18/11/2020).

Menyikapi hal itu, ada pola asuh yang harus berubah, dari mulai peran orangtua yang harus kian intens dalam mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah, hingga pendampingan dalam pemakaian gadget. Pola komunikasi di keluarga juga mesti diubah, sehingga anak merasakan kedekatan dan perhatian yang tulus dari orang tuanya

Namun harus diakui, bahwa kondisi stabilitas ekonomi yang naik turun, juga berimbas kepada masyarakat. "Saya melihat fenomena orang tua yang kehilangan pekerjaan, yang menyebabkan pendapatan keluarga menurun drastis dan berujung tingkat stress semakin tinggi, ujungnya bisa kita tebak. Pelampiasannya ke anak. Anak jadi sering dimarahi atau malah tidak jarang mendapatkan kekerasan fisik."

Perlindungan terhadap anak tetap menjadi isu yang harus diperhatikan bersama. Tulisan ini diharapkan bisa kembali mengingatkan kita semua bahwa anak juga seorang manusia. Yang di dalam dirinya juga melekat hak-hak asasi manusia seutuhnya.

Mengingat sepertiga populasi Indonesia terdiri dari anak-anak; jumlah itu sekitar 80 juta anak di Indonesia —populasi anak di Indonesia menjadi terbesar keempat di dunia. Mari kita bersama menjadikan momentum peringatan Hari

Anak Sedunia ini untuk tetap memperhatikan hak-hak asasi anak, bahkan itu termasuk anak-anak kita di rumah.

Anak-anak Indonesia harus tetap terlindungi, harus tetap belajar -meskipun di rumah saja. Rumah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak selama masa pandemi Covid 19. Mari kita bersama menata dunia yang lebih baik untuk setiap anak

Selamat Hari Anak Sedunia



RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2021

TARGET TAK PERNAH TERCAPAI, DPR-PEMERINTAH DIMINTA REALISTIS

Jakarta- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengingatkan DPR dan pemerintah realistis dalam menetapkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Sebab target Prolegnas Prioritas nyatanya tidak pernah tercapai. Tahun ini misalnya, dari target 54 RUU cuma 13 RUU berhasil dikerjakan dan hanya 3 diantaranya yang sebenarnya masuk prioritas.

"DPR dan pemerintah harus lebih realistis dalam menetapkan jumlah RUU ke dalam prioritas tahunan," kata Peneliti PSHK Nur Sholikin, Kamis (19/11). Catatan PSHK, sepanjang 2020, dari 13 RUU yang berhasil diselesaikan DPR dan pemerintah hanya tiga RUU yang berasal dari daftar prioritas tahunan. Ketiga RUU tersebut yaitu, RUU Mineral dan Batu Bara, UU Cipta Kerja, dan UU Bea Materai.

Sementara, RUU lain yang diselesaikan

merupakan daftar kumulatif terbuka serta pengesahan APBN dan perjanjian internasional. Nur mengatakan, Prolegnas Prioritas semestinya memiliki arah dan tujuan yang jelas. Dengan demikian, produk legislasi yang disusun dan dihasilkan tidak asal-asalan. "Prioritas tahunan bukan semata soal daftar RUU yang direncanakan. Namun juga merupakan instrumen yang menggambarkan arah politik dalam formulasi kebijakan ke dalam undang-undang," ucapnya.

Nur mengingatkan pembentukan suatu RUU berdasarkan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Karena itu, Nur menuturkan, DPR dan pemerintah perlu memilah RUU yang betul-betul memiliki nilai urgensi. DPR dan pemerintah juga harus mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air saat ini.

Menurutnya, RUU yang berpotensi

menimbulkan kontroversi sebaiknya ditunda dahulu. Nur pun menyinggung soal pembahasan UU Cipta Kerja yang hingga saat ini masih mengundang perdebatan karena prosesnya yang dianggap tidak partisipatif. "Dalam menentukan prioritas tahun 2021, DPR dan pemerintah hendaknya juga mempertimbangkan situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung," kata dia.

Diberitakan, DPR sudah memulai menginventarisasi 37 RUU yang akan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Di antaranya yaitu RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan juga RUU Ketahanan Keluarga. Ada pula RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, dalam penyusunan Prolegnas Prioritas itu belum dapat disetujui, sebab belum adanya pembahasan bersama pemerintah. (ist)

3 Ruu Kontroversial Masuk Dalam Daftar Inventarisir DPR 2021

RUU BPPI

RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPPI) menjadi salah satu RUU kontroversial yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2021. RUU usulan Baleg DPR RI ini sebelumnya menuai berbagai kontroversi di masyarakat.

Awalnya, rancangan aturan ini bernama RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila yang dimotori oleh PDIP. Rancangan aturan ini mendapatkan berbagai penolakan dari masyarakat, salah satunya oleh Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. RUU tersebut dianggap dapat mengganggu Pancasila sebagai dasar negara. Karena penolakan itu, pemerintah kemudian mengajukan perubahan dari RUU HIP, menjadi RUU BPPI yang berfokus pada pengaturan badan tersebut.

RUU Ketahanan Keluarga

RUU Ketahanan Keluarga diusulkan oleh anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani, anggota Fraksi Golkar Endang Maria Astuti, Anggota Fraksi Gerindra Sodik Mujahid, dan anggota Fraksi PAN Ali Taher. RUU ini ditolak karena terlalu mencampuri urusan pribadi.

Rancangan UU ini di antaranya, mengatur tentang kewajiban suami dan istri dalam pernikahan, wajib lapor bagi keluarga atau individu LGBT. Aktivitas sadism dan masokisme juga dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dalam RUU ini.

RUU Minol

RUU Larangan Minuman Beralkohol diusulkan 21 anggota DPR, yaitu 18 orang dari Fraksi PPP, 2 orang dari Fraksi PKS, dan 1 orang dari Fraksi Gerindra. RUU Minol sebenarnya telah diusulkan sejak 2015, namun terus mengalami penundaan. RUU ini kembali masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR



RENCANA MUTASI PEJABAT DI TRIWULAN TERAKHIR MASA JABATAN

DISENTIL DPRD SURABAYA, WALIKOTA RISMA DINILAI LANGGAR ATURAN

SURABAYA - Jelang habisnya masa jabatan, Walikota Surabaya Tri Rismaharini berencana mutasi pejabat di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRD Surabaya pun langsung menyentil Risma dan mengingatkan bila mutasi bisa dilakukan sebelum enam bulan masa jabatan Walikota berakhir.

"Yang kita ketahui itu untuk kepala daerah diberi batas waktu paling tidak enam bulan sebelum masa berakhir tidak boleh mengajukan mutasi kecuali atas izin kemendagri. Izin mendagri bisa jadi celah," ujar Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi'i sesuai melakukan hearing, Kamis (19/11)./2020).

Kabar yang santer terdengar, salah satu pejabat yang bakal dimutasi adalah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Suharto Wardoyo. Alasan karena Kadinsos tidak mau membagikan sembako demi kepentingan salah satu paslon.

"Kami tentu saja ingin tau. Apakah ini benar. Tadi saat ditanya bu Mia (Kepala Badan Kepegawaian Diklat/BKD Kota Surabaya, Mia Santi Dewi) tidak mau menjawab. Mengatakan tidak tahu atau tidak betul. Terus yang betul seperti apa?" ujarnya.

Sementara dalam surat yang sama juga akan mendefinisikan Suharto Wardoyo sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) yang sebelumnya sebagai Plt. Kabar lain, Suharto Wardoyo akan di-stafahlikan.

Imam khawatir, jika mutasi OPD dilakukan jelang tiga bulan masa akhir jabatan walikota akan dijadikan alat politik. Imam menegaskan ASN harus netral. Dirinya mencontohkan, terdapat ASN yang jadi ketua RT/RW di kampungnya, ketika terdapat bantuan dari salah satu paslon dan ASN itu ikut membantu langsung diberi sanksi dan diperiksa inspektorat.

Sementara itu, Kepala Badan Ke-



pegawaian Diklat (BKD) Kota Surabaya, Mia Santi Dewi tak bisa menjelaskan secara rinci ASN yang diusulkan untuk diganti. "Standar kerja pegawai (SKP) Capaian pegawai setahun sekali. Dalam penilaian itu sudah ada terkait kualitas dan kuantitas. Sudah ditentukan cara menghitungnya," katanya tanpa mau menjelaskan secara detil. (ist)

11 MINGGU BERGEMING DI ZONA MERAH, 5 WILAYAH DISOROT PEMERINTAH

Jakarta - Satgas Penanganan Covid-19 mengungkap ada lima kabupaten/kota yang sudah berminggu-minggu ada di zona merah. Kepala daerah diminta turun tangan untuk menurunkan risiko penularan corona di daerah tersebut.

"Pada konferensi pers lalu, 28 kabupaten/kota ada di zona merah atau zona risiko tinggi pada pekan ini. Ada 5 kabupaten/kota yang sudah ada di zona merah selama 3 minggu atau lebih," kata Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/11).

Untuk diketahui, umlah kasus positif virus Corona COVID-19 pada Kamis (19/11/2020) bertambah 4.798 kasus. Total positif menjadi 483.518, sembuh 406.612 dan meninggal 15.600. Sementara jumlah suspek per hari ini sebanyak 63.546, dan jumlah spesimen yang diperiksa hampir 50 ribu yaitu 47.630.

Wiku mengatakan, jika suatu wilayah berada di zona merah selama berminggu-minggu, artinya pemerintah dan masyarakatnya sudah lengah. Dia meminta Satgas COVID-19 daerah meningkatkan dan memasifkan testing serta tracing serta maksimalkan pelayanan kesehatan untuk pasien COVID-19 sehingga kasus aktif dan kematian bisa menurun serta kesembuhan bisa terus ditingkatkan.

Satgas minta kepala daerah turun tangan. "Mohon bantuan gubernur, wali kota, dan bupati betul-betul perhatikan kondisi ini. Kita tidak boleh lengah, tak boleh

28 KAB/KOTA ZONA MERAH PADA PEKAN INI



WILAYAH ZONA MERAH YANG DISOROT PEMERINTAH

| 3 minggu berturut-turut | 4 minggu berturut-turut | 5 minggu berturut-turut | 11 minggu berturut-turut |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Pemalang, Jawa Tengah, Kutai Timur, Kalimantan Timur. | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. | Kota Bandar Lampung, Lampung. | Pati, Jawa Tengah. |

membiarkan kondisi ini berlama-lama," kata dia. "Jangan jadikan daerah Anda jadi sumber utama penularan. Pastikan juga protokol kesehatan dilakukan disiplin oleh masyarakat," tambahnya.

Wiku juga memaparkan ada 10

kabupaten/kota di zona merah dengan skor mendekati zona oranye. Kesepuluh daerah ini ialah Gunung Sitoli, Payakumbuh, Tanjung Pinang, Pesawaran, Cilegon, Karawang, Sragen, Lumajang, Kupang, dan Kutai Timur. (ist)

GERAKKAN EKONOMI, REL KERETA MADIUN-SLAHUNG PONOROGO PERLU REAKTIFASI

Madiun - Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) mengajukan hasil penelitian terkait reaktifasi jalur kereta api Madiun - Slahung, Ponorogo. Penelitian yang dilakukan sejak awal tahun 2020 tersebut diharapkan dapat menghidupkan potensi ekonomi di kedua kota tersebut wilayah sekitarnya.

Direktur Utama PPI, Amirulloh mengatakan penelitian dosen-dosen PPI tersebut sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Meski rel kereta jalur Madiun - Slahung sudah banyak yang tertutup aspal, namun reaktifasi dinilai lebih mudah dan menghemat biaya dibanding dengan membangun mulai dari nol lagi.

"Menurut kami itu memberikan dampak signifikan untuk masyarakat," ujar Amir di Lobby Sun Hotel, Kamis (19/11).

Amir menjelaskan, apabila reaktifasi rel lintas sepanjang 58,345 Km terwujud, maka masyarakat sekitar akan mendapatkan imbas positif. Dari segi ekonomi bukan hanya

mengembangkan wisata di Kota Madiun, namun juga memudahkan akses dari terminal barang Ponorogo.

"Akses titik awalnya dari Kota Madiun, karena Daop 7 berpusat di Stasiun Madiun. Saya berharap ini segera terwujud meski investasi kereta api tidak murah," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Madiun, Maldi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mendukung penuh terhadap reaktifasi rel dengan luas 981.412,2 Km. Selain sejalan dengan pembangunan wisata pemkot, reaktifasi tersebut juga menghidupkan kembali sejarah Madiun tempo dulu. "Itu



Walikota Madiun Maldi dan Direktur Utama PPI Amirulloh saat paparan hasil penelitian rel kereta api Madiun-Slahung Ponorogo di Sun Hotel, Kota Madiun, Kamis (19/11). (Foto: Gery)

potensi, kalau bisa dioperasionalkan. Itu bisa sejarah buat anak-anak. Saya nggak mau bentuknya bus, saya maunya seperti kereta di Jepang," jelas Maldi saat sambutan.

Maldi menilai, keadaan lintasan rel dan jembatan Madiun - Slahung, Ponorogo masih 70 persen. Terkait realisasi pembangunan, dia hanya menunggu dari pihak Dirjen Perkeretaapian. "Rel masih hidup, jembatan masih utuh, renovasi tidak begitu mahal. Mudah-mudahan tidak ada gangguan yang lain," tandasnya. (Ger)

BAWASLU CATAT 1.038 LAPORAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN

Jakarta - Bawaslu mencatat hingga 16 November terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020. Sebanyak 938 kasus telah ditindaklanjuti KASN dengan mengeluarkan rekomendasi.

"Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN," kata Ketua Bawaslu Abhan, dalam keterangannya yang dikutip dari website Bawaslu, Kamis (19/11).

Abhan mengatakan ada 1.038 pelanggaran, dengan rincian 934 merupakan temuan Bawaslu dan 104 laporan masyarakat. Kemudian KASN telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi terhadap 938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.

"Kita tahu ASN diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset negara, menggunakan fasilitas negara maka sudah seharusnya tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu," jelas Abhan.

Beberapa bentuk pelanggaran netralitas ASN di antaranya memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih paslon tertentu dan melarang/menghalangi pe-

masangan alat peraga kampanye paslon tertentu.

"Lalu ada pula penggunaan fasilitas dan anggaran negara, memengaruhi perangkat desa untuk berpihak kepada paslon tertentu, menyalahgunakan kewenangan dalam me-rencanakan program dan distribusi bantuan sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, pelanggaran lainnya, ASN terlibat dalam kampanye, terlibat sebagai tim kampanye atau tim sukses paslon, mem-buat kebijakan dalam bentuk surat ke-putusan, dan menggerakkan struktur birokrasi/memengaruhi/mengintimidasi para pegawai bawahan di jajaran.

Calon Bisa Jadi Tersangka

Melibatkan ASN bisa berujung pada sanksi pidana bagi calon atau peserta Pilkada 2020. Kejaksaaan Negeri (Kejari) Dumai, di Riau misalnya, sudah melimpahkan berkas kasus tersangka pelanggaran pilkada, Eko Suharjo, ke Pengadilan Negeri Dumai. Eko merupakan juga calon Wali Kota Dumai petahana. Dia belum bisa dimintai keterangan karena masih terpapar Covid-19. Kasi Pidum Kejari Dumai Agung Irawan menjelaskan, walaupun Eko masih

dirawat di rumah sakit karena Corona, pihaknya tetap melimpahkan berkas ke pengadilan. Eko yang juga Wakil Walkot Dumai ini diduga melibatkan ASN dalam kampanye.

Sebelumnya, Eko Suharko ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran pilkada. Eko diduga melibatkan ASN saat kampanye."Pelanggaran pidana pilkada terjadi dikarenakan salah satu Paslon (Eko Raharjo-red) diketahui melibatkan dua orang ASN saat kampanye. Paslon tersebut diduga melakukan tindak pidana pilkada yakni Pasal 187 ayat (3) jo Pasal 69 huruf n UU Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pilkada," kata Ketua Bawaslu Riau dalam siaran persnya, Kamis (29/10).

Dari rilis Bawaslu Riau, diketahui bahwa Eko Raharjo dari Partai Demokrat ini kembali melakukan pelanggaran dalam kampanye. Ada dua paslon nomor urut 01 Hendri Sandra-Rizal Akbar dan Paslon nomor urut 02 Eko Suharjo-Syarifah diduga melakukan kampanye di luar jadwal."Saat ini (dugaan pelanggaran kampanye) masih diproses oleh Bawaslu Kota Dumai," kata Rusidi.(ist)



SANKSI BAGI ASN TAK NETRAL

SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 42 / 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

PNS PELANGGAR DIKENAI

PASAL 15 AYAT 1
Sanksi moral

PASAL 16 : TINDAKAN ADMINISTRATIF
Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat

SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 53 / 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

PNS PELANGGAR DIKENAI

HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT RINGAN
Teguran Lisan dan tertulis

HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG
Penundaan kenaikan gaji berkala dan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT TINGGI
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan PNS sendiri

H-20 PILKADA SERENTAK, SEJUTA PEMILIH BELUM REKAM E-KTP

Jakarta- Hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 jatuh pada 9 Desember mendatang alias tinggal sekitar 20 hari lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus mematangkan persiapannya. Salah satunya menuntaskan perekaman e-KTP terhadap warga yang terdaftar dalam DPT. Diketahui sekitar 1% pemilih belum melakukan perekaman.

"Dari hasil pemadanan data tersebut ditemukan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sebesar 1.052.010 pemilih atau 1 persen," ucap Komisioner KPU RI Viryan Azis, Kamis (19/11).

Sesuai pemutakhiran data DPT, ada 1.754.751 pemilih yang belum merekam e-KTP. Selanjutnya dari jumlah tersebut di-

lakukan pemadanan data SIAK Dukcapil pada Rabu (18/11) kemarin. Hasilnya, jumlah pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP sebesar 1 juta orang alias tinggal 1 persen. Untuk diketahui, DPT di Pilkada Serentak 2020 sebesar 100,3 juta pemilih.

Sebagaimana aturan dalam Pasal 57 UU Nomor 10 Tahun 2016, untuk dapat menggunakan hak pilih, warga negara Indonesia harus terdaftar dalam DPT. Mereka yang namanya terlewat dan tidak masuk dalam DPT, bisa menunjukkan e-KTP saat pemungutan suara digelar. Selama terdaftar, pemilih berhak menggunakan hak pilihnya.

KPU saat ini terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direk-



Perekaman e-KTP bagi pemilih pemula di Pilkada 2020

torat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menuntaskan perekaman tersebut. Gerakan dukungan perekaman e-KTP yang dilakukan KPU antara lain menyosialisasikannya, mengirim surat ke pemilih, hingga melakukan jemput bola ke pemilih yang belum melakukan perekaman. (Ist)

A high-angle photograph of a rustic wooden table. On the table are three white coffee cups, each with a saucer and a spoon. The coffee has a golden-brown latte art design. There are also two small glass water tumblers. The background is slightly blurred, showing a green chair and a potted plant.

GANDENG SWALAYAN BESAR, KBRI BERLIN GENCAR PROMOSI KOPI DI JERMAN

Photo by Andrey Bond on Unsplash

Kedutaan Indonesia di Jerman (KBRI Berlin) bersama pengusaha distributor kopi Indonesia My Bali Coffee dan PT Nabu Kopi Ranah Indonesia melakukan promosi kopi di dua pasar swalayan terbesar di Jerman: Edeka dan Rewe.

Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, mengatakan Edeka dan Rewe menjual berbagai jenis kopi Indonesia di swalayan dalam jaringan mereka.

Menariknya pengenalan kopi ini dikemas dengan mobil combi klasik VW tahun 1960an yang disulap menjadi coffee combie.

Saat ini sudah ada 330 swalayan Edeka dan Rewe menjual kopi Indonesia dan bahkan mereka telah memesan ribuan ton kopi Indonesia.

Menurut Dubes Havas, ada kesamaan antara bangsa Indonesia dan Jerman. Keduanya penggemar kopi. Bedanya, bangsa Jerman meminum kopi 5,2 kg per orang per tahun. Sementara orang Indonesia rata-rata hanya meminum kopi 1,3 kg per orang per tahun.

Beberapa jenis kopi indikasi geografis arabika asal Indonesia masuk ke Jerman antara lain Gayo, Lintong, Mandailing, Preanger, Bajawa dan Bali yang termasuk dalam specialty coffee.

KBRI Berlin mengembangkan strategi promosi kopi dengan beberapa cara di antaranya mengikuti kursus tentang kopi dan pelatihan menjadi barista di rumah coffee roastery paling besar di Berlin.

Dubes Havas dan beberapa staf telah memiliki sertifikat dari SCAE atau Specialty Coffee Association Europe sebagai barista.

KBRI Berlin juga melakukan pertemuan virtual antara asosiasi kopi dan importir Jerman dengan asosiasi kopi dan eksportir Indonesia. Pembeli dan penjual dapat bertemu langsung membahas rencana ekspor impor.

Selain itu KBRI Berlin melakukan promosi kopi melalui radio jazz Jerman. Para radio DJ disuguhkan kopi Indonesia dan dilanjutkan dengan wawancara tentang kopi Indonesia.

Promosi kopi juga dilakukan di industri kapal pesiar Jerman. Promosi memerlukan pendekatan dan strategi tersendiri yang saat ini sedang dimatangkan dengan berbagai pihak.

Edukasi kepada publik Jerman seperti melalui pemasaran langsung kopi Indonesia di swalayan dengan cara yang unik ini akan memberi nilai lebih untuk dapat mengubah cita rasa kopi di Jerman.

Survai dilakukan Deutscher Kaffeeverband

menyebutkan 72 persen orang Jerman mengkonsumsi kopi di rumah, 21,8 persen menikmati kopi ketika bekerja atau di kafe, dan sisanya 5,7 persen menikmati kopi bersama kerabat dan teman.

Ini lah mengapa perdagangan kopi di Jerman tidak terlalu terpengaruh oleh aturan pembatasan sosial selama pandemi.

Pemilik merek MyBali Coffee Sascha Bayu Handojo mengatakan penjualan kopi Indonesia secara online justru meningkat di masa pandemi. Dia menargetkan 1.000 gerai kopi baru di tahun 2021 agar kopi Indonesia semakin dikenal konsumen Jerman (Ant).





VIRUS CORONA BISA BERTAHAN SAMPAI PULUHAN TAHUN

Penelitian baru menemukan bahwa kekebalan Covid-19 bisa bertahan lebih dari 8 bulan, bahkan berpotensi bertahan bertahun-tahun hingga dekade.

Dilansir dari Metro UK (Kamis, 19/11/2020) para peneliti menemukan bahwa tingkat sel B dan T yang penting untuk melawan penyakit, tetap stabil hingga 8 bulan sejak infeksi awal terjadi pada pasien.

Laju penurunan yang lambat juga menunjukkan bahwa sel-sel kekebalan ini dapat bertahan di dalam tubuh untuk jangka waktu yang lama.

Kendati belum ditinjau atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, penelitian tersebut adalah tinjauan paling komprehensif dan jangka panjang tentang respons kekebalan tubuh terhadap virus corona baru.

Shane Crotty, ahli virologi di La Jolla Institute of Immunology yang ikut memimpin penelitian itu mengatakan bahwa jumlah ingatan kekebalan kemungkinan akan mencegah sebagian besar orang dari penyakit parah selama bertahun-tahun.

Dalam penelitian itu, peneliti mengambil sampel darah dari 185 pasien berusia 19 hingga 81 tahun yang dinyatakan positif terkena virus corona baru pada bulan-bulan pertama pandemi.

Tim peneliti yang berbasis di Amerika Serikat mengamati empat bagian dari sistem kekebalan untuk membangun gambaran

keseluruhan dari tanggapan kekebalan ketimbang komponen individu.

Keempat bagian yang diamati tersebut adalah antibody virus corona sel B yang menghasilkan antibodi, dan dua jenis sel T yang membunuh sel yang terinfeksi.

Para ilmuwan menemukan bahwa lima bulan setelah infeksi awal, memori kekebalan yang terdiri dari setidaknya tiga kompartemen imunologi dapat diukur pada sekitar 90 persen subjek.

Memori kekebalan ini, yang terdiri dari berbagai antibodi, juga ditemukan tahan lama dan menurun sangat lambat - yang konsisten dengan kemungkinan mereka bertahan selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun.

Temuan menggembirakan ini telah didukung oleh bukti yang keluar dari kelompok penelitian lain, seperti sel memori kekebalan yang tersisa setidaknya tiga bulan setelah infeksi virus corona awal terjadi.

Pada pekan lalu, para peneliti dari Jerman menemukan bahwa pasien Covid-19 yang pulih juga memiliki sel kekebalan 'pembunuh' yang melindungi tubuh bahkan ketika antibodi sulit dideteksi.

Ahli imunologi terkemuka menyarankan bahwa hasil ini semuanya mengarah pada virus corona baru yang bertindak sebagai penyakit 'konvensional', setelah

beberapa minggu kritis pertama telah berhasil dilalui.

Meskipun sejumlah kecil pasien ditemukan tidak memiliki kekebalan jangka panjang, kemungkinan setelah terpapar virus dalam jumlah yang lebih rendah, vaksin diharapkan dapat bekerja dan melindungi tubuh.

Tingginya jumlah pasien yang menunjukkan kekebalan jangka panjang juga menunjukkan bahwa vaksin mungkin tidak harus diberikan setiap tahun, seperti yang dilakukan pada mekanisme vaksin flu saat ini.

Studi terbaru menemukan bahwa penderita SARS (terkait erat dengan coronavirus 2019) masih membawa sel kekebalan lebih dari 17 tahun setelah infeksi pertama.

Meskipun studi baru-baru ini dari Imperial College London menemukan kekebalan terhadap Covid-19 dapat menurun dari waktu ke waktu, tidak jelas apakah ini akan menyebabkan pasien sangat rentan terhadap infeksi ulang.

Beberapa ahli imunologi menyarankan bahwa perbandingan dengan flu biasa, tidak akurat karena jumlah variasi genetik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan virus corona baru.

Sementara yang lain telah mencatat bahwa adalah hal yang wajar ketika tingkat antibodi menurun dari waktu ke waktu, dan mereka hanya membentuk satu bagian dari sistem kekebalan. (Ist)

LANGKAH AKTIFKAN FITUR PESAN MENGHILANG DI WHATSAPP



Foto : Christian Wiediger/Unsplash

WhatsApp Inc, penyedia aplikasi perpesanan populer yang dimiliki Facebook, telah meluncurkan fitur baru disappearing messages atau pesan yang bisa menghilang otomatis dalam waktu tertentu, dan sekarang fitur itu sudah tersedia dalam aplikasi pembaruan versi beta di Google Play.

Meski masih dalam versi beta, 2.20.207.3, pembaruan itu sudah mengusung fitur pesan menghilang dan bisa diaktifkan dengan baik dengan memperbarui aplikasi WhatsApp ke versi terbaru tersebut.

Terus, bagaimana cara mengaktifkan fitur pesan menghilang otomatis tersebut, berikut langkah-langkahnya.

Pertama, tentu Anda perlu mengunduh aplikasi WhatsApp pembaruan terlebih dahulu. Bagi pengguna perangkat Android, Anda bisa mengunduhnya melalui link berikut: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp>.

Jika sudah mengunduh dan pembaruan (update) terinstal, mulailah dengan membuka aplikasi WhatsApp Anda. Lalu, silakan Anda buka jendela percakapan salah satu kontak dan tekan tombol "tiga titik di pojok kanan atas" dan lanjutkan tekan "View Contact" (Lihat kontak).

Kemudian Anda tekan menu "Disappearing messages" yang dihiasi dengan ikon jam. Jika ada halaman keterangan dan menu "Lanjutkan" tekan saja. Anda selanjutnya akan menemukan tombol "On dan Off" pada menu Disappearing messages untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur pesan menghilang otomatis.

Pada WhatsApp Group langkahnya tidak jauh berbeda. Pada tombol "tiga titik" di kanan atas halaman percakapan grup, silakan tekan. Kemudian tekan "Group info" dan Anda akan menemukan menu "Disappearing messages" lalu tekan dan Anda akan menemukan tombol "On dan Off" di

sana untuk mengaktifkannya.

WhatsApp membuat pesan menghilang otomatis default dalam waktu tujuh hari, jadi apabila Anda mengaktifkan fitur itu pada salah satu kontak, pesan percakapan Anda akan menghilang dengan sendirinya setelah tujuh hari.

Fitur baru WhatsApp itu sekarang sudah tersedia bagi pengguna WhatsApp di seluruh dunia, termasuk Indonesia sejak 18 November 2020 (Ant).



BAU KETIAK TIDAK ENAK, INI CARA ATASINYA

Bau badan memang normal untuk setiap orang, tapi bau ketiak terkadang bisa lepas kendali. Bahkan dengan mandi dan memakai parfum sepertinya tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Namun kamu tak perlu cemas, terdapat berbagai cara untuk mengatasi bau ketiak. Seperti dilansir dari Times of India, berikut ini cara-cara untuk



PAKAI SABUN MANDI ANTI-BAKTERI

Bakteri itulah yang dapat membuat ketiak bau, bukan keringat kamu. Salah satu cara untuk mengatasinya Carilah sabun mandi dengan Benzoyl Peroxide, yang dapat membantu mengurangi bakteri dan mencegah bau badan.



GUNAKAN CUKA APEL

Kamu juga bisa mengoleskan cuka sari apel untuk melawan bakteri. Ini akan membantu mengurangi bau dengan menyeimbangkan tingkat pH kulit. Jangan gunakan cuka apel disaat kamu baru saja mencukur atau waxing.



KERINGKAN KETIAK SEBELUM MENGAPLIKASIKAN APA PUN

Tidak dikeringkan dengan benar sebelum memakai deodoran merupakan salah satu yang memicu terjadinya bau tak sedap. Pastikan kamu terlebih dahulu mengeringkan diri dengan benar sebelum memakai deodoran.



MENGANTI PRODUK YANG BERBEDA

Seringkali, deodoran atau antiperspirant tertentu tidak menyatu dengan kulit kita. Jika merasa semprotan tidak berhasil, maka kamu harus mengubah merek atau produk kamu. Terkadang lotion dan parfum kamu tidak berfungsi dan malah membuat ketiak berbau tidak sedap.



MEMAKAI PEMBERSIH TANGAN

Jika tidak memiliki antiperspirant atau deodoran, kamu dapat gunakan pembersih tangan untuk membantu menjinakkan bau tak sedap. Namun, jika kamu baru saja mencukur atau melakukan waxing, kamu harus menghindari cara ini karena kulit bisa terbakar.



MENCUKUR BULU KETIAK SECARA TERATUR

Untuk mengurangi risiko munculnya bau ketiak, kamu perlu untuk mencukur bulu ketiak secara teratur. Pasalnya, bulu ketiak dapat menahan penguapan keringat, sehingga ketiak menjadi lembap dan membuat bakteri penyebab bau badan berkembang biak dengan cepat. (Ist)

Mimpi RI (dari hal 1)

Pemerintah memperkirakan ada sekitar 160.680.000 penduduk Indonesia yang mencari pekerjaan di 2045. Pada tahun tersebut, Indonesia diprediksi menjadi negara berpendapatan tinggi. Dari proyeksi tersebut, diperkirakan total penduduk Indonesia mencapai 309 juta jiwa. Di mana sekitar 52% atau 160.680.000 jiwa merupakan kelompok usia produktif.

"Proyeksi demografi 309 juta populasi, 53% produktif dan mereka jelas adalah angkatan kerja, dan mereka butuh pekerjaan dan akan menciptakan pekerjaan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara serap aspirasi implementasi UU Cipta Kerja bidang perpajakan yang digelar secara virtual, Kamis (19/11).

Dengan kondisi seperti itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah harus mengambil langkah jitu agar masyarakat Indonesia benar-benar menjadi produktif di tahun 2045. Langkah yang diambil adalah melakukan reformasi di bidang pendidikan, dengan menyediakan seluas-luasnya pelatihan agar menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga menjadikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai modal penciptaan lapangan kerja. "Ini tujuannya supaya tidak hanya high income country atau size economy jadi terbesar nomor 4 di dunia, tapi mampu menciptakan kesejahteraan yang makin merata," katanya.

Sementara itu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/7DRRR) sebesar 25 basis poin (bps) dari 4 persen menjadi 3,75 persen pada November 2020. Begitu pula dengan tingkat suku bunga deposit facility dan bunga lending facility masing-masing turun 25 bps menjadi 3 persen dan 4,5 persen.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 November 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7DRR sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen," ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI periode November 2020 secara virtual, Kamis (19/11).

Perry mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang terus membaik. Pertumbuhan ekonomi kuartal III di sejumlah negara mulai membaik. "Indikator menunjukkan perbaikan ekonomi global, dari sisi mobilitas masyarakat, peningkatan BMI, dan jasa di AS dan China, serta membaiknya keyakinan ekonomi," katanya.

Selain itu, volume perdagangan dan

harga komoditas ikut menurun. Di sisi lain, ketidakpastian mereda di pasar keuangan usai Pemilu AS. Hal ini turut meningkatkan nilai tukar mata uang di dunia, termasuk rupiah.

Keputusan RDG juga mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang ikut membaik, tercermin dari kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III yang tidak setinggi kuartal II. Permintaan domestik juga mulai membaik secara bertahap. "Kinerja ekspor juga membaik, terutama didorong permintaan dari AS dan China," tuturnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan membaik pada kuartal IV 2020 dan meningkat pada 2021. Proyeksi ini muncul dari keberlangsungan kebijakan moneter dan fiskal hingga program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Beberapa indikator makro yang dipertimbangkan bank sentral nasional, yaitu Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang diperkirakan surplus. Hal ini tercermin dari peningkatan surplus neraca perdagangan serta neraca transaksi modal dan finansial karena capital inflow mencapai US\$3,68 miliar.

Cadangan devisa juga berada di tingkat yang cukup, yaitu US\$133,7 miliar. BI memperkirakan Defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit/CAD) akan berada di bawah 1,5 persen dari PDB pada akhir tahun ini.

Selain itu, BI juga mempertimbangkan sinyal positif dari penguatan nilai tukar rupiah tercatat menguat 3,94 persen secara point-to-point (p-to-p). Penguatan rupiah didorong oleh capital inflow. Rupiah sampai 18 November 2020 mencatat depresiasi 1,33 persen kalau dibandingkan akhir 2019.

Sementara inflasi masih rendah. Inflasi bulanan sebesar 0,07 persen, inflasi tahun berjalan 0,95 persen dan 1,44 persen secara tahunan. Inflasi terjaga karena kestabilan nilai tukar rupiah dan permintaan.

BI memperkirakan inflasi lebih rendah dari target 3 persen plus minus 1 persen pada 2020 dan kembali ke sasarannya di 3 persen plus minus 1 persen pada 2021. Bank sentral nasional turut mempertimbangkan kondisi pasar keuangan, di mana likuiditas diklaim tetap longgar.

Sampai 17 November 2020, BI menambah likuiditas atau quantitative easing sebesar Rp680,89 triliun terdiri dari GWM Rp155 triliun dan ekspansi moneter Rp510,09 triliun. Hal ini membuat rasio Alat Liquid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 30,65 persen per Oktober 2020.

Rata-rata suku bunga deposito dan kredit

modal kerja turun dari masing-masing menjadi 4,93 persen dan 9,38 persen. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) turun menjadi 6,13 persen per 18 November 2020.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) bank sebesar 23,41 persen pada Agustus 2020. Rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) sebesar 3,15 persen (gross) atau 1,07 persen (net). Pertumbuhan kredit bank turun lagi menjadi minus 0,47 persen. Sementara pertumbuhan DPK meningkat jadi 12,12 persen per Oktober 2020. "Intermediasi bank diperkirakan akan membaik seiring pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya.

Terpisah, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan hanya akan mencapai separuhnya dari proyeksi pemerintah yang sebesar 5% dalam APBN 2021. Hal ini karena sektor keuangan dan sektor riil pada tahun depan diperkirakan masih berjalan sekitar 50% dari kapasitas.

"Separuhnya jadi sekitar 2,5% hingga 3% saya rasa lebih realistis," ujarnya pada diskusi Proyeksi Ekonomi Indonesia 2021: Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi, Rabu (18/11). Menurut dia, pemulihan ekonomi di tahun depan masih sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19. Meski muncul harapan bahwa program vaksinasi akan dilakukan pada tahun depan namun pelaksanaannya masih memiliki banyak tantangan. (ist,ins)



GADUH RIZIEQ, WAKIL GUBERNUR DKI MANGKIR PANGGILAN POLISI

Jakarta- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mangkir dalam pemeriksaan polisi terkait kasus peristiwa pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan FPI Rizieq Shihab. Sementara untuk mendalami kejadian, Polda Metro Jaya juga sudah mengumpulkan sejumlah CCTV di lokasi.

Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan empat saksi ialah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senior Manajer Aviacition Security Bandara Soekarno-Hatta, ketua panitia akad nikah, dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk diperiksa hari ini. Namun yang hadir sampai hari ini ada dua, dari Bandara Soetta dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Ariza menerangkan alasannya tidak memenuhi panggilan polisi lantaran ada agenda lain yang mesti diikuti. Hanya saja, dia mengatakan, bakal hadir pada pemanggilan



Diketahui menghadiri acara HRS, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mangkir dari panggilan polisi

kedua yang direncanakan pada Senin (23/11/2020) mendatang.

"Saya sebagai Wakil Gubernur tadi malam terima surat panggilan untuk klarifikasi dijadwalkan tadinya hari ini [Kamis] jam 10 karena tidak bisa saya minta hari Jumat. Tapi hari Jumat dari polda ada acara, jadi direncanakan hari senin jam 11," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (19/11).

Menurutnya, tidak ada masalah terkait

dengan undangan klarifikasi tersebut. Dia menegaskan bakal memberikan informasi sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. "Siapa saya akan datang, gak ada masalah. Kita semua harus memenuhi undangan panggilan klarifikasi," kata dia.

Terpisah Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, "Anggota terus kumpulkan alat-alat bukti lain. Termasuk mengumpulkan alat bukti digital dan memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar daerah tersebut." Yusri belum memerinci jumlah CCTV yang telah diamankan petugas. Dia menyebut CCTV tersebut menjadi bahan petunjuk polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

Yusri menambahkan pihaknya akan melakukan gelar perkara setelah alat bukti yang dikumpulkan telah lengkap. "Kalau semuanya sudah lengkap baru kita lakukan gelar perkara awal untuk menentukan apa bisa dinaikkan ke penyidikan," ungkap Yusri. (ist)

BEDA SURAT PANGGILAN ANIES DAN EMIL

GUBERNUR DKI JAKARTA, ANIES BASWEDAN

Mendalami pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.

Pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 216 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil

Mendalami Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, lalu Pasal 93 UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan Pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP.

Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sementara Pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP berbunyi:

Pasal 212: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 214: Ayat (1) berisi tentang; Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan Ayat (2): yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka dan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat, serta pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Pasal 216: Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Pasal 218: Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.